LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN MEI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Kamis, 9 Juni 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 41,55 %

b. Keuangan = 7.447.577.840 (39,28%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.410.000			9.810.500		
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	16.410.000	100	74,65	9.810.500	(25,35)	Pelaksanaan kegiatan Menyesuaikan kebutuhan, karena terkendala teknis dalam perencanaan kegiatan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.175.000			300.000		
1	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	6.175.000	25	4,86	300.000	(20,14)	Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	10.000.000			0		
1	Workshop Penyusunan PPRG bagi OPD Kab/Kota	10.000.000	100	0	0	(100)	Pengampu PPRG di Kabupaten/Kota sering mengalami pergantingan, sehingga dibutuhkan pemahaman terkait PUG dan PPRG mulai dari awal
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.401.250.000			811.463.169		
1	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	2.401.250.000	40	33,80	811.463.169	(6,20)	Penjadwalan ulang dari Sekretariat DPRD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.675.000			4.400.000		
1	4. Pelaksanaan Koordinasi Puspaga	7.675.000	85,34	57,34	4.400.000	(28)	Belum terserap pada anggaran Narasumber dan Makan Minum
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal							
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	136.632.000			81.688.668		

1	Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Muslimat NU	68 107 000	100	62,97	42 664 000	(37,03)	Masih menunggu SK Gub tentang pelaksana terbaik bhakti sosial dan pelayanan KB Muslimat NU
2	Penggerakan dan Bhakti Sosial Pelayanan KB Aisyiyah	68 525 000	100	59,92	39 024 668	(40,08)	Masih menunggu SK Gub tentang pelaksana terbaik bhakti sosial pelayanan KB Aisyiah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	70 320 000			7 339 516		
1	Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	7 466 000	100	30,51	1 948 879	(69,49)	SSk diundur menyesuaikan jadwal mitra kerja BKOW
2	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	16 294 000	100	0	0	(100)	SSk diundur menyesuaikan jadwal mitra kerja BKOW
3	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui pembuatan buku panduan lansia perempuan	17 050 000	100	0	0	(100)	Pembuatan buku panduan lansia belum dapat dilaksanakan karena menyesuaikan jadwal mitra BKOW
4	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui	5 000 000	100	0	0	(100)	SSK diundur pelaksanaan menyesuaikan jadwal mitra kerja BKOW

	peningkatan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan						
5	Kegiatan Opersional DWP Tahun 2020	7.860.000	66,66	44,46	2.430.637	(22,20)	Belanja ATK (Kertas HVS, Refill tinta) belum sesuai dengan harga rekanan yang ada di e-blangkon
6	Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota	16.650.000	40	27,18	2.960.000	(12,82)	Belanja perjalanan DWP diambil menyesuaikan kebutuhan organisasi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000			1.000.000		
1	Rapat Koordinasi APSAI (Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia)	2.000.000	100	50	1.000.000	(50)	SSK dibagi menjadi 2 tahap pelaksanaan (Bulan Maret dan Juni)
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	14	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Kegiatan yang mengalami deviasi negatif/ permasalahan substantif :

1. Ada banyak indikator yang tercantum dalam Perda PA no 4 Tahun 2022, antara lain penyusunan tiga Rapergub, Pelembagaan UPTD PKSAI, Pembentukan KPAD, Kampanye Jokawin bocah, dll yang membutuhkan dukungan lintas sektor;
2. Data New Siga terkait capaian urusan Dalduk KB belum bisa diakses secara keseluruhan karena ada perbaikan aplikasi,
3. Semua data tribina dan uppka/s yang ada di new siga, tidak berupa jumlah kelompok hanya ada jumlah sasaran, sehingga penyesuaian,
4. 22 Kab/Kota belum menyusun GDPK 5 pilar;
5. Pemahaman Kabupaten/Kota terkait indikator KLA belum optimal;
6. Belum ada mekanisme yang jelas dalam pemberian rekomendasi Dispensasi Kawin;
7. Belum ada mekanisme pelibatan anak dalam pembangunan di tingkat desa;
8. IDG akan menjadi salah satu indikator penilaian APE;
9. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang kerjasama dengan Dewan dapat berubah sewaktu-waktu;
10. Kegiatan yang terkait dengan BKOW dan DWP dapat berubah sewaktu-waktu (menyesuaikan kebutuhan organisasi),
11. Harga di e-blankon lebih tinggi dari harga di DPA;
12. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pendataan di Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Provinsi;
13. Hasil review Kemen PPPA terkait DAK Non Fisik: Kegiatan DAK Non Fisik pada BOPPA Manajemen pada Seksi Perlindungan Perempuan harus digeser ke BOPPA Manajemen pada Seksi Perlindungan Anak (sesuai juknis), pergeseran kode rekening cetak MMT dan uang harian menjadi uang transport;

14. BOPPA layanan pada kode rekening Medicolegal dan layanan pendampingan tenaga ahli belum bisa terserap maksimal,Â
15. Penyelesaian SK Gubernur terkait Pelaksana terbaik penggerakan dan bakti sosial pelayanan KB masih menunggu dari bulan Maret 2022,
16. Berkurangnya jumlah SDM PLKB,

Upaya

Upaya mengatasi permasalahan tersebut :

1. Koordinasi antar lintas sektor (biro hukum, akademisi, NGO),
2. Koordinasi dengan BKKBN,
3. Advokasi ke kab/kota yang belum menyusun GDPK,
4. Melakukan advokasi dan Desk Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan nilai VA KLA,
5. Menyusun konsep panduan pemberian rekomendasi Dispensasi Kawin di Jawa Tengah,
6. Menyusun konsep Jogo Konco,
7. Advokasi kepada partai politik dan penyelenggara pemilu,
8. Koordinasi dengan Sekretariat DPRD terkait jadwal pelaksanaan kegiatan dengan Dewan,
9. Kordinasi dengan BKOW dan DWP terkait jadwal pelaksanaan kegiatan,
10. Menyesuaikan harga e-blankon di anggaran perubahan,
11. Mengoptimalkan pendataan koordinasi melalui rakor dan desk,
12. Pergeseran kode anggaran didalam sub kegiatan dan antar sub kegiatan berkoordinasi dengan BPKAD dan Kemen PPPA,
13. Kode rekening Medicolegal dan layanan pendampingan tenaga ahli pada BOPPA layanan akan di geser pada layanan penjangkauan dan pendampingan korban,
14. Koordinasi intens dengan TU Gubernur terkait SK Gubernur Pelaksana terbaik penggerakan dan bakti sosial pelayanan KB,
15. Mengoptimalkan PPKBD dengan meningkatkan kapasitas PPKBD

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan Bulan Juni :

1. Pelaksanaan advokasi pembentukan PATBM (Seksi PA),
2. Sosialisasi implementasi penyerasian kebijakan melalui Rumah Dataku (Seksi Dalduk),
3. Workshop advokasi pendidikan kependudukan dalam rangka sosialisasi gerakan jo kawin bocah dan cegah stunting (seksi dalduk),
4. Sosialisasi gerakan jokawin bocah melalui kegiatan kelompok PIK-Remaja (Seksi KS),
5. Workshop peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha kelompok uppka (seksi KS),
6. Bimtek peningkatan kualitas produk dan jaringan usaha kelompok uppka (Seksi KS),
7. Layanan Puspaga dalam bentuk Bimbingan masyarakat melalui Live Instagram (Seksi PHA),
8. Rapat rutin Pengurus Forum Anak Jawa Tengah (Seksi PHA),
9. Sosialisasi pendidikan Gender bagi pelajar SMA/SMK (Seksi KHP),
10. Evaluasi PUG (Seksi KHP),
11. Pelatihan PPEP (Seksi KHP),
12. Penyusunan kebijakan PUG (Seksi KHP),
13. Peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Seksi KHP),
14. Pendampingan pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota (Seksi KHP),
15. Sosialisasi dan Advokasi peningkatan kualitas keluarga (Seksi KHP),
16. Evaluasi pelaksanaan pengembangan kapasitas petugas penunjang layanan perempuan dan anak di Kabupaten/Kota (Seksi KHP),
17. Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (Seksi Parmas),
18. Rapat koordinasi APSAI (Seksi Parmas),
19. Penguatan peran serta BKOW dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui peningkatan peran perempuan dalam pengentasan kemiskinan (Seksi Parmas),
20. Proses penyusunan profil (PUG, PUHA dan Kependudukan) (Seksi Data),
21. Proses Penginputan data pilah berbasis Gender dan Anak (Seksi Data),
22. Proses penginputan data kekerasan berbasis Gender dan Anak (Seksi Data),
23. Pertemuan lintas sektor dalam sinergitas bersama mitra dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Seksi Perlindungan Perempuan),
24. Peningkatan kapasitas advokasi pendamping dan perempuan kelompok rentan (Seksi Perlindungan Perempuan),
25. Advokasi penggerakan KIE dengan mitra kerja (Seksi KIE),

26. Penyerahan hadiah pelaksana terbaik penggerakan dan baksti sosial pelayanan KB (Seksi KIE),
27. Orientasi Peningkatan Kapasitas & Pembentukan Paguyuban PPKBD tingkat Provinsi (Seksi KB)
28. Monitoring pelayanan KB dalam rangka Harganas & Satu Juta Akseptor (Seksi KB)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya,
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas,
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan,
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal,
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dan RAB tahun 2023 dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Mei 2022, sebagai berikut

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	39 16	41 55	39 28	2 39
2	Sekretariat	40 91	43 16	40 73	2 25
3	Bidang KHPP	36 20	35 83	34 99	(0 37)
4	Bidang PHPA	28 81	38 96	38 11	10 16
5	Bidang KB KIE	44 92	48 16	43 66	3 24
6	Bidang DALDUK KS	23 32	29 71	24 16	6 39
7	Bidang Data Parmas	41 84	47 20	43 95	5 37

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Mei 2022 untuk menjadikan periksa

Semarang, Kamis, 9 Juni 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI DINAS JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001